

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112). Pada awal pembentukan Provinsi Jambi, baru terdiri dari Kabupaten Merangin, Kabupaten Batanghari dan wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir serta Kotapraja Jambi. Pada tahun 1958, wilayah-wilayah Kecamatan Kerinci Ulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Ilir, ditetapkan sebagai wilayah Kabupaten Kerinci.

Provinsi Jambi mengalami perubahan yang signifikan, sejak terjadinya pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif pada tahun 1999, tepatnya melalui Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemekaran selanjutnya dilakukan melalui Undang-undang nomor 25 tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga sampai tahun 2012, secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.

Derap langkah serta keberhasilan pembangunan Provinsi Jambi selama tahun 2015, tidak terlepas dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi 2010-2015, yang penyusunannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, pasal 5 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 150 ayat (3), serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri nomor 54 tahun 2010. Sesuai dengan aturan tersebut, maka dalam RPJMD dimuat visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penetapan Rencana Strategis SKPD dan Penyusunan RKPD.

Kepala Daerah terpilih dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta menginformasikan LPPD kepada masyarakat. Sebagai dasar penyusunan LKPJ dan LPPD tersebut, telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007 ini, dijelaskan bahwa dalam LKPJ wajib menggambarkan program dan kegiatan yang direncanakan, realisasi dari program dan kegiatan serta kendala dan solusi yang dilakukan untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disusun, merupakan rangkaian dalam proses pembangunan untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan program yang dilaksanakan. Dengan mekanisme seperti ini, perkembangan pembangunan dan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dapat diketahui dan dicermati, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menilai dan memberikan masukan perbaikan dan penajaman dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

LKPJ yang disampaikan ini, memuat dan menguraikan program pembangunan yang dilaksanakan oleh Gubernur terpilih, periode 2010–2015, yang melampirkan juga serapan pembiayaan program dan kegiatan SKPD selama tahun 2015, sebagai salah satu bentuk penyebaran informasi pertanggungjawaban penyelenggaraan pembangunan kepada publik melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Gubernur Jambi sebagai Wakil Pemerintah di daerah, sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011, berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Vertikal yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi Jambi.

1.2 Gambaran Umum Daerah

1.2.1 Kondisi Geografis

1.2.1.1 Letak Wilayah dan Topografi

Provinsi Jambi secara Geografis terletak antara 0°45' sampai 2°45' Lintang Selatan dan antara 101°10' sampai 104°55' Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan dengan Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu.

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 km² dengan luas daratan 50.160,05 km² dan luas perairan 3.274,95 km², meliputi 9 kabupaten dan 2 kota, yang secara rinci terdiri dari:

Tabel 1.1
Luas Wilayah Provinsi Jambi

No	Kab/Kota	Luas	Persentase
1	Kabupaten Kerinci	3.355,27 km ²	6,69
2	Kabupaten Merangin	7.679 km ²	15,31
3	Kabupaten Sarolangun	6.184 km ²	12,33
4	Kabupaten Batanghari	5.804 km ²	11,57
5	Kabupaten Muaro Jambi	5.326 km ²	10,62
6	Kabupaten Tanjab Timur	5.445 km ²	10,86
7	Kabupaten Tanjab Barat	4.649,85 km ²	9,27
8	Kabupaten Tebo	6.461 km ²	12,88
9	Kabupaten Bungo	4.659 km ²	9,29
10	Kota Jambi	205,43 km ²	0,41
11	Kota Sungai Penuh	391,5 km ²	0,78

Sumber : Jambi Dalam Angka Tahun 2015

Luas wilayah terbesar di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin sebesar 7.679 km² atau sebesar 15,31 persen dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing sebesar 6.461 km² dan 6.184 km².

Secara administratif, jumlah kecamatan dan desa/kelurahan di Provinsi Jambi tahun 2014 sebanyak 138 kecamatan dan 1.551 desa/kelurahan, dimana jumlah kecamatan terbanyak di Kabupaten Merangin yang mencapai 24 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan terbanyak berada di Kabupaten Kerinci mencapai 287 desa/kelurahan.

Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian (Bappeda, 2013):

Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1persen), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin;

Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4persen), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan

Daerah dataran tinggi >500 m (14,5persen), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin.

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 meter dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 meter dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Adapun topografi wilayah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Klasifikasi Ketinggian di Provinsi Jambi

Topografi	Ketinggian/ (m/dpl)	Luas		Wilayah/Kabupaten
		Ha	persen	
1		2	3	4
Dataran Rendah	(0 - 100)	3.431.165	67	Kota Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi, Merangin, Batang Hari.
Dataran sedang	(100 - 500)	903.180	17	Sebagian Sarolangun, Tebo, sebagian Batang Hari, Kota Sungai Penuh, Merangin, sebagian Tanjung Jabung Barat,
Dataran Tinggi	(>500)	765.655	16	Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Merangin, sebagian Sarolangun dan sebagian Bungo
Jumlah		5.100.000	100	

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi, 2015

1.2.1.2 Klimatologi

Provinsi Jambi sebagai salah satu Provinsi di Sumatera yang terkenal dengan iklim tropis dan kaya akan sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga tetap menjadi kerentanan terjadi perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Sepanjang tahun 2015, Provinsi Jambi memiliki karakteristik curah hujan sedang dan lembab, sehingga Jambi termasuk daerah yang beriklim tropis. Rata-rata curah hujan pada tahun 2015 mencapai 2009,9 mm, sedangkan jumlah penyinaran matahari 3 jam per hari dengan kelembaban udara rata-rata sebesar 158 persen. Suhu udara rata-rata mencapai 25 derajat Celsius, sedangkan untuk dataran tinggi di Wilayah Barat mencapai 22,0 derajat celcius.

1.2.1.3 Penggunaan Lahan

Di luar hutan, penggunaan lahan Provinsi Jambi masih didominasi oleh perkebunan karet dengan kontribusi sebesar 26,20persen. Diikuti oleh

perkebunan sawit sebanyak 19,22persen. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.3 di bawah.

Tabel 1.3
Penggunaan Lahan

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase
1	Lahan Permukiman	49,631	1.01
2	Sawah Tadah Hujan	126,662	2.58
3	Tegalan/Ladang	117,516	2.40
4	Kebun Campuran	112,787	2.30
5	Kebun Karet	1,284,003	26.20
6	Kebun Sawit	941,565	19.22
7	Kebun Kulit Manis	93,609	1.91
8	Kebun teh	4,691	0.10
9	Semak dan alang-alang	87,177	1.78
10	Hutan Lebat	1,433,470	29.25
11	Hutan Belukar	413,406	8.44
12	Hutan Sejenis	187,704	3.83
13	Lain-lain	47,757	0.97
	Jumlah	4,899,978	100.00

Sumber: RTRWP Jambi tahun 2013 - 2033

Sebagian besar lahan di Provinsi Jambi digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian, baik pertanian lahan sawah maupun pertanian lahan bukan sawah. Berdasarkan karakter kompleks ekologinya, perkembangan kawasan budidaya khususnya untuk pertanian terbagi atas tiga daerah yaitu kelompok ekologi hulu, tengah dan hilir. Masing-masing memiliki karakter khusus, dimana pada kompleks ekologi hulu merupakan daerah yang terdapat kawasan lindung, ekologi tengah merupakan kawasan budidaya dengan ragam kegiatan yang sangat bervariasi dan kompleks ekologi hilir merupakan kawasan budidaya dengan penerapan teknologi tata air untuk perikanan budidaya dan perikanan tangkap.

1.2.1.4 Potensi Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan Strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi :

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan)
2. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi)
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau)
4. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi)

Untuk Kawasan Strategis Provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya
2. Kawasan Strategis Perkotaan Muaro Bungo dan Perkotaan Sungai Penuh
3. Kawasan Strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tanjab Barat dan Tanjab Timur.
4. Kawasan strategis Bangko – Sarolangun

Kawasan strategis Provinsi Jambi dari sudut kepentingan sosial dan budaya adalah :

1. Kawasan wisata sejarah Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi.
2. Kawasan Permukiman Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun.

Sedangkan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Kabupaten Kerinci.

Untuk luas kawasan hutan di wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya didominasi oleh Hutan Produksi Tetap dan Taman Nasional. Rincian luas kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 4.990 Ha, Taman Nasional 657.120 Ha, Taman Hutan Raya 33.943 Ha, Taman Wisata Alam 413 Ha, Hutan Lindung 112.722 Ha, Hutan Produksi Terbatas 264.034 Ha, Hutan Produksi Tetap 1.006.266 Ha, dan Hutan Lindung Gambut 60.810 Ha.

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang berpotensi terhadap bencana Geologi yaitu di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Bencana banjir yaitu di Kabupaten Batang Hari dan beberapa kabupaten lainnya yang merupakan kejadian rutin di setiap musim hujan. Selain itu, Provinsi Jambi juga termasuk daerah yang memiliki titik api akibat dari kebakaran lahan dengan wilayah terjadinya kebakaran yang berada pada Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat. Kebakaran ini disebabkan oleh adanya pembukaan lahan baru yang sangat berkaitan dengan lahan-lahan perkebunan baik milik masyarakat maupun perkebunan swasta.

1.2.2 Demografi

1.2.2.1 Penduduk

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka 2014 yang dirilis tahun 2015 adalah sebanyak 3.317.034 jiwa dan data agregat kependudukan kecamatan tahun 2014 telah mencapai 3,3 juta jiwa. Tingkat kepadatan rata-rata sebesar 66,67 jiwa/km² kecuali Kota Jambi sebesar 2.765,23 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 220,23 jiwa/km².

Sebagaimana karakter ibukota provinsi pada umumnya yaitu sebagai pusat pemerintahan, industri dan perdagangan, maka Kota Jambi juga merupakan daerah tujuan arus migrasi.

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 51 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat,

Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 49 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo).

1.2.2.2 Tenaga Kerja

Berdasarkan Berita Resmi Statistik tahun 2015, jumlah angkatan kerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2015 mencapai 1.550.400 orang, mengalami peningkatan sebanyak 49.900 orang jika dibandingkan dengan angkatan kerja pada Agustus 2014 yaitu 1.500.500 orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Jambi pada Agustus 2015 mencapai 1.550.400 orang, mengalami penambahan sebanyak 59.400 orang, jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 sebesar 1.491.000 orang. Penambahan ini lebih dikarenakan adanya lonjakan atau peningkatan jumlah penduduk yang berusia angkatan kerja di Provinsi Jambi.

Tabel 1.4
Kepadatan Penduduk per Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Luas Daerah (km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Kerinci	3.355,27	234.003	69,74
2	Merangin	7.679,00	360.187	46,91
3	Sarolangun	6.184,00	272.203	44,02
4	Batang Hari	5.804,00	257.201	44,31
5	Muaro Jambi	5.326,00	388.323	72,91
6	Tanjabtims	5.445,00	212.084	38,95
7	Tanjabbar	4.649,85	304.899	65,57
8	Tebo	6.641,00	324.919	50,29
9	Bungo	4.659,00	336.320	72,19
10	Kota Jambi	205,43	568.062	2.765,23
11	Sungai Penuh	391,5	86.220	220,23
Jumlah		50.160,05	3.344.421	66,67

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2014

Dari 1.550.400 orang yang bekerja pada Agustus 2015, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan sebesar 579.900 orang, diikuti berusaha sendiri 324.400 orang, pekerja keluarga/tidak dibayar 230.600 orang dan berusaha dibantu buruh tetap 223.900 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang bekerja, sebanyak 701,9 ribu orang dari total penduduk bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah,

Sebanyak 299,6 ribu orang pekerja berpendidikan SMP, kemudian 291,6 ribu orang pekerja berpendidikan SMA, 128,6 ribu pekerja berpendidikan Universitas, 95,7 ribu orang pekerja berpendidikan SMK, dan 33,6 ribu orang lulusan Diploma I/II/III.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik Tahun 2015, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Jambi pada Agustus 2015 mencapai 4,34 persen, mengalami penurunan jika dibandingkan dengan keadaan Agustus 2014 sebesar 5,08 persen. Secara kuantitas jumlah pengangguran Provinsi Jambi terus meningkat, yaitu sebesar 24,1 ribu orang pada Agustus 2015, turun pada Agustus 2014 menjadi 9,4 ribu orang.

Kondisi ketenagakerjaan kabupaten/kota se Provinsi Jambi, menempatkan Kota Jambi sebagai kota dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tertinggi yaitu sebesar 262.291 orang, sementara TPAK terendah terjadi di Kota Sungai Penuh sebesar 41.109 orang. TPT terendah terjadi pada Sekolah Dasar sebesar 1,89 persen, sementara TPT tertinggi terjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebesar 9,15 persen.

1.2.3 Kondisi Ekonomi

1.2.3.1 Potensi Unggulan Daerah

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di wilayah Sumatera yang memiliki potensi sumberdaya alam yang cukup melimpah. Sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Jambi yang dapat diperbaharui antara lainnya adalah sumberdaya alam yang berasal dari perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sedangkan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbaharui Provinsi Jambi juga kaya akan bahan tambang dan galian yang menjadi potensi unggulan daerah seperti batu bara, gas bumi, minyak, tambang mineral lainnya. Sedangkan potensi industri pengolahan di Provinsi Jambi yang potensial untuk dikembangkan terutama untuk pengolahan dengan bahan baku *Crude Palm Oil (CPO)*, *Crumb Rubber*, *Virgin Coconut Oil (Vico)*, *Cassiavera* serta olahan dari produk tanaman pangan dan produk dari ikan.

Bila dilihat dari komoditi unggulan Provinsi Jambi, maka terdapat 12 komoditi unggulan yang didominasi dari berbagai sub-sektor pertanian antara lain: karet, kelapa sawit, kelapa dalam, *Cassiavera*, kopi, buah-buahan, pinang,

nenas, perikanan laut dan darat dan peternakan serta hasil pertambangan umum lainnya.

1.2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Perekonomian Provinsi Jambi pada Tahun 2015 mengalami pertumbuhan sebesar 4,21 persen. Pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan tahun 2014 yang bertumbuh sebesar 7,35 persen. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2015 mencapai Rp. 155.110,35 miliar, sedangkan pada Tahun 2014 sebesar Rp. 153.857,1 miliar.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi didukung oleh hampir semua lapangan usaha kecuali pertambangan dan penggalian yang berkontraksi sebesar 0,22 persen. Pertumbuhan tertinggi pada sektor Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang mencapai 11,02 persen; diikuti oleh sektor jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar 10,05 persen serta informasi dan komunikasi sebesar 9,83 persen.

Besarnya sumbangan masing-masing sektor dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi didominasi oleh sektor-sektor yang memiliki nilai nominal besar, walaupun pertumbuhan sektor yang bersangkutan relatif kecil. Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor tumbuh sebesar 11,02 persen dengan sumber pertumbuhan sebesar 0,98 persen. Demikian pula halnya dengan sektor jasa kesehatan dan kegiatan social yang menyumbang total pertumbuhan sebesar 10,05 persen dengan sumber pertumbuhan 0,11 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kedua sektor tersebut memiliki potensi yang sangat besar di Provinsi Jambi.

PDRB Provinsi Jambi tahun 2015, berdasarkan penggunaan atau permintaan yang digerakkan oleh beberapa komponen permintaan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi pada komponen konsumsi lembaga swasta nirlaba yang mencapai 4,41 persen, diikuti oleh konsumsi rumah tangga dengan laju pertumbuhan sebesar 4,23 persen dan ekspor barang dan jasa dengan laju pertumbuhan mencapai 2,93 persen. Struktur ekonomi Provinsi Jambi tahun 2015 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen ekspor barang dan jasa sebesar 66,02 persen, diikuti konsumsi rumah tangga sebesar 46,00 persen dan pembentukan modal tetap bruto sebesar 24,16 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jambi tahun 2015, komponen ekspor barang dan jasa memiliki sumber pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 1,96 persen diikuti pengeluaran konsumsi rumah tangga member andil pertumbuhan sebesar 1,87 persen. Sedangkan pembentukan modal tetap bruto justru memberi andil negative 0,18 persen.

Kinerja ekonomi Provinsi Jambi salah satunya juga ditunjukkan dengan angka inflasi. Laju inflasi Kota Jambi pada tahun 2015 berada pada posisi 1,37 persen. Inflasi terjadi pada 5 (lima) kelompok barang dan jasa karena adanya kenaikan indeks kelompok bahan makanan sebesar 2,67 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,19 persen; Kelompok Perumahan sebesar 0,43 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,11 persen; serta Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan sebesar 1,01 persen. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.5 di bawah.

Tabel 1.5
Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, Year on Year Tahun 2014 - 2015

No	Inflasi	2014	2015
1	Desember	2,61	0,91
2	Desember (Tahun Kalender)	8,72	1,37
3	Desember terhadap Desember (year on year)	8,72	1,37

Sumber: Berita Resmi BPS 2015

Pada sisi lain angka pengangguran mengalami penurunan dari 5,08 persen pada Agustus 2014 menjadi 4,34 persen pada Agustus 2015. Jumlah penduduk miskin pada bulan Maret 2014 sebesar 263,80 ribu jiwa meningkat jika dibandingkan pada bulan Maret 2015 sebesar 300,71 ribu jiwa. Geliat ekonomi dan perdagangan Provinsi Jambi yang terus tumbuh dengan baik, dan menjadi daya tarik investor luar, juga ditunjukkan dengan meningkatnya pengedaran uang tunai dan transaksi giralisasi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Jambi ini, telah menarik minat dunia perbankan untuk membuka operasionalisasinya di Jambi, yang sampai saat ini berdasarkan Jurnal Bank Indonesia Tahun 2015 di Provinsi Jambi terdapat 378 kantor bank, yang terdiri dari 1 (satu) kantor pusat, 59 kantor cabang, 258 kantor cabang pembantu, 60 kantor kas. Sedangkan kantor BPR tercatat 32 kantor.

Tabel 1.6
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010 Tahun
2015 (persen)

Lapangan Usaha		Triw III- 2015 terhadap Triw II- 2015	Triw IV- 2015 terhadap Triw III- 2014	Triw IV- 2015 terhadap Triw IV- 2014	Laju Pertumbuhan 2015	Sumber Pertumbuhan 2015
A	Pertanian, kehutanan	-0,98	-1,16	2,9	5,36	1,39
	Dan perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,09	-2,46	-2,34	-0,22	-0,06
C	Industri Pengolahan	-0,33	0,22	3,22	2,33	0,27
D	Pengadaan Listrik,	1,31	8,5	0,77	4,18	0
	dan Gas					
E	Pengadaan Air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	3,31	3,16	7,6	4,08	0,01
F	Konstruksi	9,49	6,47	4,92	2,88	0,21
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,93	0,04	7,13	11,02	0,98
H	Transportasi dan pergudangan	0,7	2,04	6,7	6,59	0,2
I	Penyediaan akomodasi makan dan minum	2,67	1,53	6,87	6,49	0,07
J	Informasi dan komunikasi	4,53	3,38	11,73	9,83	0,32
K	Jasa keuangan dan asuransi	2,68	1,54	1,78	2,11	0,05
L	Real estat	0,39	0,12	2,78	4,19	0,06
M	Jasa perusahaan	0,27	0,81	4,57	6,32	0,06
N	Adm. pemerintahan dan jaminan social wajib	0,18	14,8	13,31	6,79	0,23
O	Jasa Pendidikan	2,48	0,21	5,99	7,48	0,23
P	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	4,2	0,39	10,53	10,05	0,11
Q	Jasa lainnya	2,11	1,62	8,3	8,76	0,08
R	PDRB	0,82	0,36	3,18	4,21	4,21

Sumber: Berita Resmi BPS 2015